

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam

periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran;
- b) Neraca;
- c) Laporan Operasional;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer;
- d) Surplus/Defisit;
- e) Pembiayaan;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak;
- d) Persediaan;
- e) Investasi jangka panjang;
- f) Aset tetap;
- g) Kewajiban jangka pendek;
- h) Kewajiban jangka panjang;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 104 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 091 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 068 Tahun 2016 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahulun		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	
		3.2.1	Pendapatan -LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa

	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset
		3.4.2 Kewajiban
		3.4.3 Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

a. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Pajak				
2	Pajak				
3	Retribusi				
4	Retribusidll				

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan sebesar Rp..... dari target yang ditetapkan Rp..... atau%
2. Realisasi pendapatan lebih/(kurang) dari anggaran disebabkan

b. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Belanja Pegawai	8.760.738.000,00	7.849.560.047,00	(911.177.953,00)	89.60
2	Belanja Barang dan Jasa	3.702.671.000,00	3.426.398.190,00	(276.272.810,00)	92.54

3	Belanja Modal	1.167.940.000,00	1.120.179.850,00	(47.760.150,00)	95.91
	Jumlah	13.631.349.000,00	12.396.138.087,00	(1.235.210.913,00)	90.94

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.849.560.047,00 dari target yang ditetapkan Rp. 8.760.738.000,00 atau 89.60%.
2. Realisasi Belanja Brg Jasa sebesar Rp. 3.426.398.190,00 dari target yang ditetapkan Rp. 3.702.671.000,00 atau 92.54 %.
3. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.120.179.850,00 dari target yang ditetapkan Rp. 1.167.940.000,00atau 95.91%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 90.94 % dari yang dianggarkan.

1.4. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Pelaksanaan kegiatan belum menyesuaikan *Time Scedule* dari anggaran kas yang telah direncanakan sehingga mengakibatkan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran kas kurang optimal.
2. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan.
3. Ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat, hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh SKPD adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah				

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2016, maka realisasi pendapatan yang dikelola SKPD Tahun 2017 mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp. atau%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

A. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola SKPD setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp..... Realisasi sebesar Rp..... atau%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah				
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah				

1) Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar% atau realisasi mencapai Rp.....

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Pajak Hotel				
Hotel Melati III				
Hotel Melati II				
Hotel Melati I				
Losmen				
b. Pajak Restoran				
Restoran				
Rumah Makan				
c. Pajak Hiburan				
Bioskop				
Pagelaran Seni				
Arena Bilyard				
Hiburan Insedentil				
Permainan Ketangkasan				
Pertandingan				

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
Kolam Renang				
d. Pajak Reklame				
Papan/Bilboard/Megatron				
Kain				
Melekat/Stiker				
Reklame Selebaran				
e. Pajak Penerangan Jalan				
f. Pajak Bahan Galian C				
Batu Pecahan				
Pasir				
Batu Belah				
g. Pajak Sarang Burung Walet				
h. Pajak Air Bawah Tanah				
i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah				

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola SKPD dapat terealisasi Rp..... atau% dari target sebesar Rp. sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Pelayanan Kesehatan				
b. Pelayanan Persampahan/Kebersihan				
c. Penggantian Biaya Cetak KTP/KK				
d. Parkir di Tepi Jalan Umum				

e. Pelayanan Pasar				
f. Pengujian Kendaraan Bermotor				
g. Pemakain Kekayaan Daerah				
h. Tempat Pelelangan				
i. Terminal				
j. Tempat Khusus Parkir				
k. Tempat Penginapan/Pesanggrahan				
l. Rumah Potong Hewan				
m. Pelayanan Kepelabuhan				
n. Tempat Rekreasi dan Olahraga				
o. Penjualan Prod Usaha Daerah				
p. Penutupan Jalan				
q. Ijin Mendirikan Bangunan				
r. Ijin Gangguan /Keramaian				
s. Ijin Trayek				
t. Ijin Jasa Konstruksi				
u. Ijin penebangan pohon jati				
v. Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)				
w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)				
x. Tanda Daftar Industri (TDI)				
y. Ijin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan				
z. Ijin Pengangkutan hasil Hutan				
Jumlah				

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp.....dari yang direncanakan sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah				
PD Air Minum (PDAM)				
PD Perbengkelan				
PD Percetakan				
PD Farmasi				
b. Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank				
PT. Bank Jateng				

PD Bank Puspakencana				
BKK Banjarharjo				
BKK Brebes				
c. Bagian Laba Penyertaan Pihak Ketiga				
Dana Bergulir-Usaha Koperasi				
Dana Bergulir-Usaha Pertanian				
Dana Bergulir-Usaha Peternakan				
Dana Bergulir-Usaha Perikanan				
Jumlah				

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp..... dari yang direncanakan sebesar Rp..... atau% dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Hasil Penj Aset Yang Tdk Dipisahkan				
Penjualan Drum Bekas				
Penjualan Bongkaran Proyek				
b. Jasa Giro Kas Daerah				
c. Bunga Deposito				
Deposito pada BPD Jateng				
Deposito pada Bank Mandiri				
Deposito pada BRI				
Deposito pada Bank Bukopin				
Deposito pada BPR/BKK				
Deposito pada BTPN				
Deposito pada Bank Muamalat				
d. Penerimaan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah				
e. Denda Keterlambatan Pel Pekerja				
f. Penerimaan Lain-lain				
g. Kompensasi Sumber Air Kaligiri				
h. Penerimaan Pabrik Gula				

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
i. Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah				
Jumlah				

Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2016 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. **12.406.875.781** dari anggaran Rp. **13.631.349.000** dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Belanja Operasi (BO)	12.463.409.000	11.275.958.237	90.47	14.341.245.484
b. Belanja Modal (BM)	1.167.940.000	1.120.179.850	95.91	1.797.670.248
c. Belanja Tak Terduga (BTT)				
d. Belanja Transfer (BT)				
Jumlah	13.631.349.000	12.396.138.087	90.94	16.138.915.732

A. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja modal. Dalam Tahun Anggaran 2017 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 11.275.958.237,00dari anggaran sebesar Rp12.463.409.000,00 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Belanja Pegawai	8.760.738.000	7.849.560.047	89.60	10.025.994.012
b. Belanja Barang dan Jasa	3.702.671.000	3.426.398.190	92.54	4.315.251.472
c. Belanja Bunga				

d. Belanja Subsidi				
e. Belanja Hibah				
f. Belanja Bantuan Sosial				
g. Belanja Bantuan Keuangan				
Jumlah	12.463.409.000	11.275.958.237	90.47	14.341.245.484

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Gaji dan Tunjangan	7.496.505.000	6.628.526.047	83.84	8.609.605.512
b. Tambahan Penghasilan PNS	1.214.850.000	1.171.900.000	96.46	1.366.750.000
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
d. Biaya Pemungutan Pajak Daerah				
e. Biaya Pemungutan Retribusi				
f. Honorarium PNS	6.150.000	6.150.000	100	8.625.000
g. Honorarium Non PNS	17.040.000	16.930.000	99.35	15.610.000
h. Uang Lembur	26.193.000	26.054.000	99.47	25.403.500
i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
j. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
k. Belanja BLUD				
l. Belanja BOS				
Jumlah	8.760.738.000	7,849,560,047.00	89.60	10.025.994.012

b.Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	341.178.000	287.884.063	84.38	295.287.999
b. Belanja Bahan/Material	98.277.000	81.629.000	83.06	432.120.250
c. Belanja Jasa Kantor	1.106.470.000	1.019.947.345	92.18	1.406.729.707
d. Belanja Premi Asuransi	1.344.000	1.225.732	91.20	0
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	114.822.000	84.395.103	73.50	72.697.401

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
f. Belanja Cetak dan Penggandaan	111.557.000	101.720.600	91.18	149.015.425
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	63.650.000	60.650.000	95.29	39.800.000
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas	34.600.000	34.550.000	99.86	29.000.000
i. Belanja Sewa Alat Berat				
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	26.410.000	26.400.000	99.96	75.741.500
k. Belanja Makanan dan Minuman	710.671.000	679.422.500	95.60	840.660.900
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
m. Belanja Pakaian Kerja	3.000.000	3.000.000	100	4.950.000
n. Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	80.900.000	79.198.400	97.90	11.075.000
o. Belanja Perjalanan Dinas	846.017.000	818.403.197	96.74	739.935.290
p. Belanja Beasiswa Tugas Belajar				
q. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi Dan Bimbingan Teknis PNS				
r. Belanja Perjalanan Pindah Tugas				
s. Belanja Pemulangan Pegawai				
t. Belanja Pemeliharaan	24.500.000	14.947.250	61.01	14.698.000
u. Belanja Jasa Konsultansi	139.275.000	133.025.000	95.51	203.540.000
v. Belanja BLUD				
w. Belanja Barang-Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat				
x. Belanja BOS				
Jumlah	3.702.671.000	3.426.398.190	92.54	4.315.251.472

c. Realisasi Belanja Hibah TA 2017 sebesar Rp..... merupakan Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta;

Barang Hibah	Jumlah	(Rp)	Penerima
--------------	--------	------	----------

1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Jumlah			

- d. Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2017 sebesar Rp..... merupakan Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2017 sebesar Rp..... terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp..... dan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.....

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 1.120.179.850 dari anggaran sebesar Rp. 1.167.940.000 dengan rincian :

Belanja Modal :	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio %	Realisasi 2016
a. BM - Tanah				
b. BM - Peralatan & Mesin	310.950.000	302.306.550	97.22	805.130.248
c. BM - Gedung & Bangunan	856.150.000	817.040.000	95.43	992.091.000
d. BM - Jalan, Irigasi, dan Jaringan				
e. BM - Aset Tetap Lainnya.	840.000	833.300	99.20	449.000
Jumlah	1.167.940.000	1.120.179.850	91.02	1.797.670.248

C. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp.....

dari anggaran sebesar Rp.....

Belanja Tidak Terduga	Anggaran	Realisasi	Rasi	Realisasi
:	2017	2017	o %	2016
Belanja Tak Terduga				
Jumlah				

D. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. dari anggaran sebesar Rp.

Belanja Transfer :	Anggaran	Realisasi	Rasi	Realisasi 2016
	2017	2017	o %	
a. Bagi Hasil - Pajak				
b. Bagi Hasil – Retribusi				
Jumlah				

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2017 dan 2016.

Pendapatan-LO tahun 2017 adalah sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		

Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah - LO				
2. Pendapatan Transfer - LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO		3.943.018.634	3.943.018.634	100
Jumlah		3.943.018.634	3.943.018.634	100

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2017 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
1. Pendapatan Asli Daerah-LO				
A. Pendapatan Pajak Daerah - LO				
B. Pendapatan Retribusi Daerah - LO				
C. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO				
D. Lain-lain PAD Yang Sah - LO				
<i>Jumlah</i>				

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2017 adalah sebesar Rp dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
2. Pendapatan Transfer - LO				

A. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO				
B. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
C. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
D. Bantuan Keuangan - LO				
<i>Jumlah</i>				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2017 adalah sebesar Rp . 5.425.377.673 dengan rincian :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
A. Pendapatan Hibah - LO		3.916.081.510	3.916.081.510	100
B. Dana Darurat - LO				
C. Pendapatan Lainnya - LO		26.937.124	26.937.124	100
<i>Jumlah</i>		3.943.018.634	3.943.018.634	100

A. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
A. Pendapatan Hibah - LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang		3.916.081.510	3.916.081.510	100
<i>Jumlah</i>		3.916.081.510	3.916.081.510	100

Penjelasan :

- a. –
- b.

B. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2017 sebesar NIHIL

C. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
C. Pendapatan Lainnya - LO				
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Akumulasi Penyusutan Gedung & Bangunan		26.937.124,39	26.937.124,39	100
Jumlah		26.937.124,39	26.937.124,39	100

Penjelasan :

a. -

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
BEBAN				
A. Beban Operasi	11.452.346.323,00	18.640.057.141,01	7.187.710.818	
B. Beban Transfer				
Jumlah	11.452.346.323,00	18.640.057.141,01	7.187.710.818	

Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		

A. BEBAN OPERASI				
1. Beban Pegawai	7,849.678.011	9,948,529,218	2.098.851.207	
2. Beban Persediaan	896.758.083	5.364.585.189	4.467.827.106	
3. Beban Jasa	1,219,380,220	1,682,663,865	463,283,645	
4. Beban Pemeliharaan	99,342,353	87,395,401	(11,946,952)	
5. Beban Perjalanan Dinas	818,403,197	739,935,290	(78,467,907)	
6. Beban Bunga	-	-		
7. Beban Subsidi	-	-		
8. Beban Hibah	-	-		
7. Beban Bantuan Sosial	-	-		
8. Beban Penyusutan dan Amortisasi	568.784.459	816,948,178	248.808.637	
9. Beban Penyisihan Piutang				
10. Beban Lain-lain				
Jumlah	11.452.346.323.00	18.640.057.141	7.187.710.818	

Beban Pegawai sebesar Rp termasuk di dalamnya Beban Pegawai BLUD.

Rincian Beban Pegawai pada BLUD Unit Kerja adalah :

- a. Puskesmas Rp
- b. Puskesmas Rp
- c. Puskesmas Rp
- d. Puskesmas Rp
- e. Puskesmas Rp
- Jumlah Rp

- Sesuai Petunjuk Teknis Dana BOS, Dana BOS SD/SMP digunakan untuk pengeluaran biaya operasional sebagai berikut :

Kode Kegiatan	Uraian	Kode Rek	Nama Rek	Jumlah

- Adapun rincian penggunaan Dana BOS sebagai berikut :

Rincian Penggunaan Dana BOS SD/SMP	Nilai (Rp)
Jumlah	

3. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2017 sebesar Rp merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat sebesar Rp Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

Saldo 2016		Pengadaan 2017		Diserahkan 2017		Reklasifikasi AT		Sisa 2017	
Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)	Jml Brg	Jumlah (Rp)

4. Beban Penyusutan dan Amortisasi

- c. Beban penyusutan aset tetap tahun 2017 adalah sebesar Rp 568.784.458,83 dengan rincian :
- d. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 486.931.697,89
- e. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp 79.366.510,94
- f. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 1,886,250.00
- g. Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp 600.000,00
- Jumlah Rp 568.784.458,83
- h. - Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2017 sebesar Rp

5. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2017 sebesar Rp terdiri dari :

- a. Penyisihan Piutang Pajak
Rp
- b. Penyisihan Piutang Retribusi
Rp
- c. Penyisihan Piutang BLUD
Rp
- d. Penyisihan Bag. Lancar TP-TGR
Rp
- e. Penyisihan Piutang Lain-lain
Rp

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2017	Tahun 2016		
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
JUMLAH				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO		9,924,320	9,924,320	100
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				
JUMLAH		9,924,320	9,924,320	100
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - LO		9,924,320	9,924,320	100

Penjelasan :

1. Pada tahun 2017 dilaksanakan sensus aset tetap. Adapun barang yang berstatus rusak berat yang telah dihapus sebesar Rp 1,188,065 dengan Berita Acara Penghapusan Nomor 050/495 tahun 2017
2. Barang-barang yang telah dihapus tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp dan penerimaan kas daerah atas penjualan sebesar Rp Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai *)Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar Rp dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar Rp

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2017 dibandingkan dengan TA 2016.

Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp (6.193.054.748,51) berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp 5,861,464,752.35 ditambah Surplus-LO TA 2017 sebesar Rp (11.452.346.322,83) dikurangi koreksi ekuitas TA 2017 sebesar Rp (601.528.260,00)

Rincian Koreksi Ekuitas sebagai berikut :

Uraian	2017 (Rp)	2016 (Rp)
Koreksi Nilai Kas		
Koreksi Nilai Piutang		
Koreksi Nilai Penyisihan Piutang		
Koreksi Nilai Persediaan		
Koreksi Beban Dibayar di Muka		
Koreksi investasi		
Koreksi Nilai Tanah		
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin	(902,679,795)	
Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	(133,261,825)	
Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan	(9,900,000)	

Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya		
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan	474.628.441	(147.704.286)
Koreksi Nilai Aset Lainnya	(30.959.999)	
Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka		
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya		
Koreksi Utang Belanja		
Koreksi Lainnya		

(koreksi LPE hanya yang berkaitan dengan penurunan nilai aset tahun-tahun sebelumnya, sedangkan koreksi atas tahun ybs/th 2017 mempengaruhi Laporan-LO yaitu dicatat sebagai Pendapatan-LO/Beban)

Penjelasan : (diisi sesuai uraian pada Rekap CaLK LPE pada file LAMPIRAN-SE-PHT17.....)

1. Koreksi Nilai Kas, merupakan :
 - a.
 - b.
2. Koreksi Nilai Piutang, merupakan :
 - a.
 - b.
3. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang, merupakan :
 - a.
 - b.
4. Koreksi Nilai Persediaan, merupakan :
 - a.
 - b.
5. Koreksi Nilai Beban Dibayar di Muka, merupakan :
 - a.
 - b.
6. Koreksi Nilai Investasi, merupakan :
 - a.
 - b.
7. Koreksi Nilai Tanah, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp

8. Koreksi Nilai Peralatan Mesin, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp (902,679,795)
9. Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp (133,261,825)
10. Koreksi Nilai Jalan Irigasi dan Jaringan, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp (9,900,000)
11. Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp
12. Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp 474.628.441
13. Koreksi Nilai Aset Lainnya, merupakan :
 - a. Koreksi penyesuaian hasil sensus BMD Rp .(30.959.999)
14. Koreksi Nilai Pendapatan di Muka, merupakan :
15. Koreksi Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya, merupakan :
16. Koreksi Nilai Utang Belanja, merupakan :
17. Koreksi Lainnya, merupakan :

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut :

Uraian	Th. 2017	Th. 2016
Aset Lancar	1,502,689,037,52	1.110.026.407,52
Aset Tetap	4,675,000,310,97	4.723.058.718,83
Aset Lainnya	33.240.621,00	35,960,000.00
Jumlah Aset	6,210,929,969,49	5,869,045,126
Kewajiban	12,403,984,718.00	7,580,374.00
Ekuitas	(6,193,054,748.51)	5,861,464,752.35
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	6,210,929,969.49	5,869,045,126.35

A. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Th. 2017	Th. 2016
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	1,502,689,037,52	1,110,026,407,52
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	1,502,689,037,52	1,110,026,407,52

1. Kas

Saldo kas terdiri atas Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	Th. 2017	Th. 2016
Kas		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Kas di JKN		
Kas Lainnya		

Saldo Kas per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp
dan Saldo Kas tahun 2017 sebesar Rp terdiri atas :

1. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp..... Kas tersebut merupakan :
 - a. ...
 - b. ...
2. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp Kas tersebut merupakan :
 - a. ...
 - b. ...
3. Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
- BLUD Puskesmas	:	Rp
Jumlah	:	Rp

4. Kas Lainnya sebesar Rp merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :
 - SD : Rp pada SD Negeri
 - SMP : Rp pada SMP Negeri

2. Piutang

Saldo piutang per 31 Desember 2017 terdiri atas Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar TP-TGR, Piutang BLUD, Piutang Lain-lain sebesar Rp

Jenis Piutang	Nilai Piutang
1) Piutang Pajak Daerah	
2) Piutang Retribusi	
3) Bag. Lancar TP-TGR	
4) Piutang Lain-lain	
5) Piutang BLUD	
Jumlah	

1) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2017 adalah Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah :	2017	2016
	Rp	Rp
Piutang Pajak		
Piutang Pajak		
Jumlah		

Mutasi Piutang Pajak sebagai berikut :

Saldo Piutang Pajak Tahun 2016 Rp

Penambahan :

a. Piutang atas transaksi tahun 2017 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2017 Rp

c. dst Rp

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2017 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2017 Rp

c. dst Rp

Saldo Piutang Pajak Tahun 2017 Rp

2) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember

2017 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp..... dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	2017	2016
	Rp	Rp
Piutang Retribusi		
Piutang Retribusi		
Jumlah		

Mutasi Piutang Retribusi sebagai berikut :

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2016 Rp

Penambahan :

a. Piutang atas transaksi tahun 2017 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2016 Rp

c. dst Rp

Pengurangan :

a. Setoran tahun 2017 Rp

b. Koreksi saldo tahun 2017 Rp

c. dst Rp

Saldo Piutang Retribusi Tahun 2016 Rp

3) Bagian Lancar TP-TGR

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Bagian Lancar dari Putang TP-TGR yang akan diterima pada tahun anggaran berikutnya. Piutang ini merupakan Piutang TP-TGR yang telah ditetapkan SK Pembebanannya oleh Majelis TP-TGR.

Saldo piutang dimaksud adalah Rp..... Rincian Bagian Lancar TP-TGR adalah sebagai berikut :

Nama	Saldo 2016	Mutasi 2017		Saldo 2017
	Rp	Tambah	Kurang	Rp
1.				
2.				
3.				
Jumlah				

Mutasi Piutang TP-TGR sebagai berikut :

Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2016	Rp
<u>Penambahan :</u>	
a. Piutang atas transaksi tahun 2017	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2016	Rp
c. dst	Rp
<u>Pengurangan :</u>	
a. Setoran tahun 2017	Rp
b. Koreksi saldo tahun 2016	Rp
c. dst	Rp
Saldo Piutang TP-TGR Tahun 2017	Rp

4) Piutang Lain-lain

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp..... Rincian Piutang Lain-lain adalah sebagai berikut :

No	Piutang Lain-Lain :	Piutang Kepada	2017	2016
			Rp	Rp
1.	Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak			
2.	Piutang Kelebihan Pembayaran			
3.	Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan			
4.	Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan			
	Jumlah			

Penjelasan :

- Piutang Jaminan Pelaksanaan Putus Kontrak merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan oleh
(nama rekanan)
- Piutang Kelebihan Pembayaran merupakan piutang atas kelebihan pembayaran kepada (nama pihak ke-3)

3. Piutang Denda Keterlambatan Pekerjaan merupakan piutang atas denda keterlambatan pekerjaan Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

4. Piutang Denda Keterlambatan Pelaporan merupakan piutang atas denda keterlambatan pelaporan (*nama laporan*) yang harus diterima dari (*nama pihak yang wajib melaporkan*)

No	Uraian	Piutang Kepada	Nilai
			Rp
1.			
2.			
3.			
	Jumlah		

5) Piutang BLUD

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 belum diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp..... Rincian Piutang BLUD pada SKPD adalah sebagai berikut :

Piutang BLUD :	2017	2016
	Rp	Rp
1. Piutang		
2. Piutang		
3. Piutang		
Jumlah		

Penjelasan : (*disesuaikan dengan kondisi SKPD, penjelasan ini dapat dibuat lebih terperinci dengan lampiran tabel*)

1. Piutang sebesar Rp merupakan
2. Piutang sebesar Rp merupakan
3. Piutang sebesar Rp merupakan

6) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dibentuk sebesar piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan umur piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih per 31 Desember 2017 sebesar minus Rp..... dengan perincian sebagai berikut :

Jenis Piutang	Nilai Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
1. Piutang Pajak Daerah		-
2. Piutang Retribusi		-
3. Bag. Lancar TP-TGR		-
4. Piutang Lain-lain		-
5. Piutang BLUD		-
Jumlah		-

Saldo masing-masing rekening Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dijelaskan sebagai berikut :

Piutang Pajak Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Pajak		-
2. Piutang Pajak		-
Jumlah		-

Piutang Retribusi Daerah	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang Ret.		-
2. Piutang Ret.		-
Jumlah		-

Bagian Lancar TP-TGR (Nama Debitur)	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1.		-
2.		-
Jumlah		-

Piutang Lain-lain	Nilai Piutang	Penyisihan Piutang
1. Piutang		-
2. Piutang		-
Jumlah		-

3. Persediaan

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2017 sebagai berikut :

Persediaan :	2017	2016
	Rp	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	700.000,00	8.911.847,52
2. Obat-Obatan dan Alkes	1.501.989.038,00	1.101.010.561,00
3. Bibit Tanaman/Ternak		
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga		104.000,00
5. Persediaan Lainnya		
Jumlah	1.502.689.038,00	1.110.026.407.52

Mutasi persediaan selama tahun 2017 sebagai berikut :

No	Uraian	ATK Pakai Habis & Barang Cetak	Obat-obatan dan Alkes	Bibit Tana man/ Terna k	Perleng. Kantor/Rumah Tangga	Persediaan Lainnya		Jumlah
						Persediaan Lainnya Hbs Pakai	Barang Diserahkan kepada pihak ke-3	
I	Saldo Awal	8,911,846.52	1,101,010,561.00		104,000.00			1,110,026,407.52
II	Masuk							
	Pembelian	247,468,700.00	5,413,742,766.00		81,644,469.00	940,689,244.00		6,683,545,179.00
1	Pengadaan Hibah	247,468,700.00	19,618,300.00		81,644,469.00	940,689,244.00		1,289,420,713.00
2	masuk		5,394,124,466.00					5,394,124,466.00

	Dropping antar SKPD/Unit Kerja 3 (masuk) Reklasifikas i dari Belanja 4 Modal Reklasifikas i dari Belanja 5 Pemeliharaan n Utang 6 Persediaan Koreksi 7 Saldo Awal						
II							
I	Keluar	255,680,547.00	5,012,764,289.00	81,748,469.00	940,689,244.00		6,290,882,549.00
1	Pemakaian	255,680,547.00	5,012,764,289.00	81,748,469.00	940,689,244.00		6,290,882,549.00
	Hibah						
2	keluar (ke pihak ke-3) Dropping antar SKPD/Unit Kerja 3 (keluar) 4 Penjualan Pindah ke 5 Kadaluarsa Pindah ke 6 Rusak Reklasifikas i ke Aset 7 Tetap Koreksi 8 Saldo Awal						
	Penyesuaia						
I	n fisik						
V	akhir						
	Saldo Akhir (I+II- III+IV)	700,000	1,501,989,038				1,502,689,038

Penjelasan :

Dari saldo tersebut tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Rekap barang Kadaluarsa dan Rusak sebagai

berikut :

Barang Kadaluarsa/Usang

Persediaan :	Kadaluarsa	Usang
	Rp	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak		
2. Obat-Obatan dan Alkes		
3. Bibit Tanaman/Ternak		
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga		
5. Persediaan Lainnya		
Jumlah		

Barang Rusak

Persediaan :	Saldo
	Rp
1. ATK Pakai habis & Barang Cetak	
2. Obat-Obatan dan Alkes	
3. Bibit Tanaman/Ternak	
4. Peralatan Kantor/Rumah Tangga	
5. Persediaan Lainnya	
Jumlah	

Dari saldo tersebut sebesar Rp..... merupakan barang-barang yang direncanakan akan diserahkan kepada masyarakat namun masih berada pada SKPD Adapun rinciannya sebagaimana lampiran.

B. Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan

1 . Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) per 31

Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang di dalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp 4.675.000.310,97 dan Rp 4.723,058,718.83 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	2017	2016
	Rp	Rp
a. Tanah	18,000,000.00	18.000.000
b. Peralatan dan Mesin	5,446,069,456.00	6.162.788.376
c. Gedung dan Bangunan	4,039,460,600.00	3.383.022.250
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	37.725.000.00	49.675.000
e. Aset Tetap Lainnya	56,484,673.00	52.651.373
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan	(4.922.739.418,03)	(4.943.078.280,00)
Jumlah Aset Tetap	4.675.000.310,97	4.723.058.718,83

Rincian Aset tetap sebagai berikut :

ASET TETAP :	Th. 2017	Th. 2016
Tanah	18,000,000.00	18,000,000.00
Tanah	18,000,000.00	18,000,000.00
Peralatan & Mesin	5,446,069,456.00	6.162.788.376
- Alat - alat Berat	38,320,000.00	38.320.000
- Alat -alat Angkutan	3,518,277,333.00	3.404.465.398
- Alat Bengkel		
- Alat Pertanian & Peternakan		
- Alat -alat Kantor & RT	1,504,119,605.00	1.291.955.562,00
- Alat Studio & Alat Komunikasi	377,322,518.00	377.322.518
- Alat Ukur		
- Alat - alat Kedokteran	8,030,000.00	1.050.724.898

- Alat Laboratorium		
- Alat Keamanan		
- Peralatan Rumah Tangga		
Gedung & Bangunan	4,039,460,600.00	3.383.022.250
- Bangunan Gedung	4,009,460,600.00	3.353.022.250
- Bangunan Monumen	30,000,000.00	30.000.000
Jalan,Irigasi & Jaringan	37.725.000	49.675.000
- Jalan & jembatan		
- Bangunan Air (Irigasi)		
- Instalasi	37.725.000	49.675.000
- Jaringan		
Aset Tetap Lainnya	56,484,673.00	52.651.373
- Buku & Perpustakaan	3,494,673.00	2.661.373
- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	52,990,000.00	49.990.000
- Hewan/Ternak & Tumbuhan		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Konstruksi dalam Pengerjaan		
Jumlah	9,597,739,729.00	9.666.136.999

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016 sebesar Rp..... dan Rp..... Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Kemajuan Fisik (%)	Nominal	Keterangan
1. Pekerjaan				
2. Pekerjaan				
3. Pekerjaan				

Jumlah				
--------	--	--	--	--

Penjelasan : *(apabila nihil tidak perlu diberi penjelasan)*

1. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
2. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp
3. Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan sesuai kontrak nomor senilai Rp dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai yang telah direalisasikan adalah sebesar Rp Atas kemajuan fisik pekerjaan nilai yang masih harus dibayar sebesar Rp

Pada tahun 2017 dilaksanakan sensus Barang Milik Daerah atas barang-barang sesuai saldo Neraca tahun 2016 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel Penambahan/Pengurangan Aset Hasil Sensus				
URAIAN	SALDO NERACA 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO HASIL SENSUS
TANAH	18,000,000			18,000,000
Jumlah				
PERALATAN DAN MESIN				
a. Alat Besar	38,320,000			38,320,000
b. Alat Angkutan	3,404,465,398	115,000,000	1,188,065	3,518,277,333
c. Alat Bengkel				
d. Alat Pertanian & Peternakan				
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	1,291,955,562		87,142,507	1,204,813,055
f. Alat Studio & Komunikasi	377,322,518			377,322,518
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran	1,050,724,898		1,042,694,898	8,030,000
i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN		115,000,000	1,131,025,470	

	6,162,788,376			5,146,762,906
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung	3,353,022,250		160,601,650	3,192,420,600
b. Bangunan Monumen	30,000,000			30,000,000
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	3,383,022,250		160,601,650	3,222,420,600
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan				
b. Bangunan Air (Irigasi)				
c. Instalasi	49,675,000		11,950,000	37,725,000
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	49,675,000		11,950,000	37.725.000
ASET TETAP LAINNYA				
a. Buku & Perpustakaan	2,661,373			2,661,373
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	49,990,000			49,990,000
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan				
ASET TETAP LAINNYA	52,651,373			52,651,373
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah	9,666,136,999	115,000,000	1,303,577,120	8,477,559,879

Tabel Penambahan

URAIAN	BERTAMBAH (Rp)			JUMLAH BERTAMBAH
	BARANG BERLEBIH	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	
TANAH				-
Jumlah				
PERALATAN DAN MESIN				
a. Alat Besar				
b. Alat Angkutan		115,000,000		115,000,000
c. Alat Bengkel				
d. Alat Pertanian & Peternakan				
e. Alat Kantor & Rumah Tangga				
f. Alat Studio & Komunikasi				
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran				

i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN				
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung				
b. Bangunan Monumen				
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN				
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan				
b. Bangunan Air (Irigasi)				
c. Instalasi				
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
ASET TETAP LAINNYA				
a. Buku & Perpustakaan				
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan				
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan				
ASET TETAP LAINNYA				
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah		115,000,000		115,000,000

Tabel Pengurangan

URAIAN	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	PERSEDIAAN	R. EXTRACOMP	RUSAK BERAT (RB)	TIDAK DITE MUKAN (TD)	KOREKSI KURANG	JUMLAH BERKURANG
TANAH								
Jumlah								
PERALATAN DAN MESIN								
a. Alat Besar								
b. Alat Angkutan					1,188,065			1,188,065
c. Alat Bengkel								
d. Alat Pertanian & Peternakan								
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	4,719,000		5,250,000	6,094,647	71,026,360			87,142,507
f. Alat Studio & Komunikasi								
g. Alat Ukur								
h. Alat Kedokteran								

	337,159,277	664,456,871			41.078.750			1,042,694,898
i. Alat Laboratorium								
j. Alat Keamanan								
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	341,878,277	664,456,871	5,250,000	6,094,647	113.345.675			1,131,025,470
GEDUNG & BANGUNAN								
a. Bangunan Gedung	133,261,825					27,339,825		160,601,650
b. Bangunan Monumen								
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	133,261,825					27,339,825		160,601,650
JALAN, IRIGASI & JARINGAN								
a. Jalan & jembatan								
b. Bangunan Air (Irigasi)								
c. Instalasi	9,900,000				2.050.000			11,950,000
d. Jaringan								
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	9,900,000				2.050.000			11,950,000
ASET TETAP LAINNYA								
a. Buku & Perpustakaan								
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan								
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan								
ASET TETAP LAINNYA								
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan								
Konstruksi Dalam Pengerjaan								
Jumlah	485,040,102	664,456,871	5,250,000	6,094,647	115.395.675	27.339.825		1,303,577,120

Penjelasan barang Tidak Ditemukan sebagai berikut :

1. Tidak diketahui penyebab hilang sebanyak unit sebesar Rp .
2. dikuasai oleh pegawai sebanyak unit sebesar Rp
3. Dikuasai oleh pensiunan pegawai sebanyak unit sebesar Rp
4. Gedung dan Bangunan UPT BKKBD Losari yang telah dibongkar dan telah diganti dengan bangunan baru pada lokasi yang sama sebanyak 1 unit sebesar Rp .15.750.825
5. Gedung dan Bangunan yang telah dibongkar tanpa bangunan pengganti sebanyak . unit sebesar Rp

- Jalan Irigasi Jaringan yang telah dibongkar dan telah diganti dengan konstruksi baru pada lokasi yang sama sebanyak unit sebesar Rp
- Jalan Irigasi Jaringan yang telah dibongkar tanpa konstruksi pengganti sebanyak unit sebesar Rp
- Tidak Ditemukan karena hal-hal lain (pencurian, kebakaran, bencana alam dsb) sebanyak unit sebesar Rp
- Gedung dan Bangunan UPT BKKBD Bumiayu yang telah dikosongkan dan dibongkar karena ada sengketa dengan warga yang mengklaim bahwa tanah yang di tempati tersebut adalah miliknya, Rp .11.589.000

Adapun mutasi aset tetap periode tahun 2017 berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut :

URAIAN		Tana h	Peralat an dan Mesin	Gedun g dan Bangu nan	Jalan, Irigasi dan Jaring an	Aset tetap lainny a	Konstr uksi dalam Pengerj aan	Jumla h
SALDO HASIL SENSUS		18.00 0.000	5.146.7 62.906	3.222. 420.60 1	37.725 .000	52.65 1.373		8.477. 559.88 0
BELANJA MODAL			299.30 6.550	817.04 0.000		3.833. 300		1.120. 179.85 0
TAM BAH	HIBAH MASUK	-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI MASUK	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI SESAMA AT	-	-	-	-	-	-	-

	KAPITALISASI DARI B. BARANG	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI KDP YANG SUDAH SELESAI							
	KAPITALISASI DARI B.PEMELIHARAAN	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI KDP	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI BARANG DISERAHKAN	-	-	-	-	-	-	-
	HUTANG ASET TETAP	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-
	KOREKSI	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			299.30 6.550	817.04 0.000		3.833. 300		1.120.1 79.850
KURANG	HIBAH KELUAR	-	-	-	-	-	-	-
	MUTASI KELUAR	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE							

	SESAMA AT	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE B. PERSEDIAA N	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE B.PERJLN DINAS	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS KE B.PEMELIHA RAAN	-	-	-	-	-	-	-
	REKLAS DARI KDP KE AT							
	TDK DIKAPITALI SASI	-	-	-	-	-	-	-
	KOREKSI	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-
	SALDO AKHIR	18.000 .000	5.446.0 69.456	4.039.4 6.600	37.725. 000	56.484 .673	-	9.597.7 39.729

Mutasi Aset Tetap terdiri dari mutasi penambahan dan mutasi pengurangan Aset Tetap atas barang pengadaan tahun 2017.

Penambahan Aset Tetap terdiri atas:

- Penambahan aset dari belanja modal tahun 2017 Rp.1.120.179.850;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja persediaan tahun 2017 Rp
.....;
- Penambahan aset dari kapitalisasi belanja pemeliharaan tahun 2017 Rp
.....;

- Penambahan aset dari KDP yang telah menjadi aset tetap Rp ;
- Penerimaan aset dari donasi/hibah Rp;
- Reklasifikasi dari aset lainnya Rp;
- Reklasifikasi dari barang yang diserahkan kepada pihak ke-3 Rp;
- dst.....

(pilih yang sesuai dengan SKPD Saudara, apabila kurang dapat dikembangkan)

Pengurangan Aset Tetap terdiri atas:

- Tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap (ekstrakomptabel) Rp;
- Reklasifikasi KDP yang telah selesai dikerjakan dan menjadi aset Rp;
- Reklasifikasi ke Beban Persediaan Rp;
- Reklasifikasi ke Beban Pemeliharaan Rp;
- Reklasifikasi ke Beban Perjalanan Dinas Rp;
- Hibah keluar kepada pihak ke-3 Rp;
- Mutasi ke SKPD lain/Unit Kerja Rp;
- dst

(pilih yang sesuai dengan SKPD Saudara, apabila kurang dapat dikembangkan)

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2017 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain. Pada tahun 2017 dilaksanakan sensus barang milik daerah sesuai neraca tahun 2016 sehingga mempengaruhi perhitungan akumulasi penyusutan dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2016	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	AKUMULASI HASIL SENSUS
--------	---------------------------------	------------	-------------	------------------------------

TANAH				
Jumlah				
PERALATAN DAN MESIN				
a. Alat Besar	16.777.143,86			16.777.142,86
b. Alat Angkutan	3.070.938.969,43	115.000.000,00	1.188.065,00	3.184.750.904,43
c. Alat Bengkel				
d. Alat Pertanian & Peternakan				
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	831.983.704,50		80.930.407,00	751.053.297,50
f. Alat Studio & Komunikasi	112.233.704,60			112.233.703,60
g. Alat Ukur				
h. Alat Kedokteran	621.941.522,00		620.155.522,00	1.786.000,00
i. Alat Laboratorium				
j. Alat Keamanan				
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	4.653.875.042,39	115.000.000,00	702.273.994,00	4.066.601.048,39
GEDUNG & BANGUNAN				
a. Bangunan Gedung	248.895.435,31		34.284.024'50	214.611.410,81
b. Bangunan Monumen	6.600.000,00			6.600.000,00
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	255.495.435,31		34.284.024,50	221.211.410,81
JALAN, IRIGASI & JARINGAN				
a. Jalan & jembatan				
b. Bangunan Air (Irigasi)	20.932.500,00		4.780.000,00	16.152.500,00
c. Instalasi				
d. Jaringan				
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	20.932.500,00		4.780.000,00	16.152.500,00
ASET TETAP LAINNYA				
a. Buku &				

Perpustakaan				
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	49.990.000,00			49.990.000,00
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan				
ASET TETAP LAINNYA	49.990.000,00			49.990.000
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan				
Konstruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah	4.980.292.977,70	115.000.000,00	741.338.018,50	4.353.954.959,20

Penambahan Ak. Penyusutan Hasil Sensus BMD

URAIAN	BARANG BERLEBIH	MUTASI MASUK	HIBAH MASUK	KOREKSI TAMBAH (Ov)	JUMLAH PENAMBAHAN
TANAH					
Jumlah					
PERALATAN DAN MESIN					
a. Alat Besar					
b. Alat Angkutan		115.000.000,00			115.000.000,00
c. Alat Bengkel					
d. Alat Pertanian & Peternakan					
e. Alat Kantor & Rumah Tangga					
f. Alat Studio & Komunikasi					
g. Alat Ukur					
h. Alat Kedokteran					
i. Alat Laboratorium					
j. Alat Keamanan					
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN					115.000.000,00
GEDUNG & BANGUNAN					

a. Bangunan Gedung					
b. Bangunan Monumen					
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN					
JALAN, IRIGASI & JARINGAN					
a. Jalan & jembatan					
b. Bangunan Air (Irigasi)					
c. Instalasi					
d. Jaringan					
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN					
ASET TETAP LAINNYA					
a. Buku & Perpustakaan					
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan					
ASET TETAP LAINNYA					
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah		115.000.000,00			115.000.000,00

Pengurangan Ak. Penyusunan Hasil Sensus BMD

URAIAN	MUTASI KELUAR	HIBAH KELUAR	PERSEDIAAN	R. EXTRACOMP	RUSAK BERAT (RB)	TIDAK DITEMUKAN (TD)	KOREKSI AKURAT	JUMLAH PENGURANGAN
--------	---------------	--------------	------------	--------------	------------------	----------------------	----------------	--------------------

								(o v)	
TANAH									
Jumlah									
PERALATAN DAN MESIN									
a. Alat Besar									
b. Alat Angkutan					1.188.065,00				1.188.065,00
c. Alat Bengkel									
d. Alat Pertanian & Peternakan									
e. Alat Kantor & Rumah Tangga	4.719.000,00		2.100.000,00,	6.094.647,00	68.016.760,0				80.930.407,00
f. Alat Studio & Komunikasi									
g. Alat Ukur									
h. Alat Kedokteran	176.280.285,00	405.568.487,00			38.306.750,0				620.155.522,00
i. Alat Laboratorium									
j. Alat Keamanan									
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	180.999.285,00	405.568.487,00	2.100.000,00	6.094.647,00	107.511.575,00				702.273.994,00
GEDUNG & BANGUNAN									
a. Bangunan Gedung	28.120.719.50				6.163.305				34.284.024,50
b. Bangunan Monumen									
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN	28.120.719.50				6.163.305				34.284.024,50
JALAN, IRIGASI & JARINGAN									
a. Jalan & jembatan									
b. Bangunan Air (Irigasi)									
c. Instalasi	3.960.000,00				820.000,00				4.780.000,00
d. Jaringan									
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN	3.960.000,00				820.000,00				4.780.000,00
ASET TETAP LAINNYA									
a. Buku & Perpustakaan									
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan									
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan									
ASET TETAP LAINNYA									
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan									
Konstruksi Dalam Pengerjaan									
Jumlah	213.080.004,50	405.568.487,00	2.100.000	6.094.647	108.331.575	6.163.305,00			741.338.018,50

C. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 sebesar Rp .
33.240.621,00 dan Rp 35.960.000, dengan rincian :

ASET LAINNYA	Th. 2016	Penambahan	Pengurangan	Th. 2017
Tagihan Penjualan Angsuran				
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				
Aset Tak Berwujud	25.000.000,00			25.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.000.000'00)			(20.000.000'00)
Aset Lain-lain	30.960.000	32.148.065,00	142.735.501,00	141.547.436,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		114.494.880,00	1.188.065,00	(113.306.815,00)
Jumlah	35.960.000,00			33.240.621,00

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2017 dan 2016 sebesar Rp.25.000.000. dan Rp. 25.000.000
Saldo Aset Tak Berwujud sebesar Rp 25.000.000 merupakan aset yang berupa software/ aplikasi komputer.

- Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :
 - a.
 - b.
 - c.
- Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- b.
- c.
- d.

2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 sebesar Rp (20.000.000) terdiri atas :

- Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2016 sebesar Rp. (20.000.000)
- Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2017 sebesar Rp
- Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang mempengaruhi Ekuitas sebesar Rp

3. Aset Lain-lain Rp.141.547.436,00 terdiri atas :

a. Aset tetap Rusak Berat (RB) yang telah tidak digunakan lagi untuk operasional SKPD sebesar Rp . 115.395.675 dengan rincian sebagai berikut :

1. Saldo tahun 2016 terdapat barang-barang yang telah dijual namun belum dihapuskan sebesar Rp....., atas barang-barang tersebut telah ditindaklanjuti dengan SK penghapusan Nomor tanggal sehingga saldo tahun 2016 Rp
2. Barang RB hasil sensus 2017 yang belum dijual/dimusnahkan Rp 115,395,675.00
3. Barang RB hasil sensus 2017 yang telah dijual/dimusnahkan namun belum dihapuskan Rp

Sehingga Barang RB yang masih tercatat pada KIB sebesar Rp 115,395,675.00 (1+2+3)

4. Barang RB yang telah dijual pada tahun 2017 dan telah dihapuskan sesuai SK Hapus Nomor 050/495 tanggal 14 september 2017 Rp. 1,188,065.00

Atas barang-barang tersebut telah dihapusbukukan dan tidak tercatat

pada KIB

Tabel Barang Rusak Berat Hasil Sensus 2017

URAIAN	s.d PENGHAPUSAN		s.d PENJUALAN/ PEMUSNAHAN		BELUM PENJUALAN/ PEMUSNAHAN		JUMLAH	
	JML BRG	NOMINAL (Rp)	JML BRG	NOMINAL (Rp)	JML BRG	NOMINAL (Rp)	JML BRG	NOMINAL (Rp)
TANAH								
Jumlah								
PERALATAN DAN MESIN								
a. Alat Besar								
b. Alat Angkutan	12	1.188.065,00					12	1.188.065,00
c. Alat Bengkel								
d. Alat Pertanian & Pernakan								
e. Alat Kantor & Rumah Tangga					45	71.078.860,00	45	71.078.860,00
f. Alat Studio & Komunikasi								
g. Alat Ukur								
h. Alat Kedokteran					14	41.078.750,00	14	41.078.750,00
i. Alat Laboratorium								
j. Alat Keamanan								
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	12	1.188.065,00			59	112.157.610,00	71	113.345.675,00

GEDUNG & BANGUNAN								
a. Bangunan Gedung								
b. Bangunan Monumen								
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN								
JALAN, IRIGASI & JARINGAN								
a. Jalan & jembatan								
b. Bangunan Air (Irigasi)								
c. Instalasi						2.050.000,00		2.050.000,00
d. Jaringan								
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN						2.050.000,00		2.050.000,00
ASET TETAP LAINNYA								
a. Buku & Perpustakaan								
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan								
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan								
ASET TETAP LAINNYA								
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan								
Konstruksi Dalam								

Pengerjaan								
Jumlah	12	1.188.06 5,00			59	114.207. 610,00		115.395.6 75,00

b. Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Tabel Detail Engineering (DE)

Uraian	Saldo 2016	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2017
DE rumah aman	30.960.000,00		30.960.000,00	
Jumlah	30.960.000,00		30.960.000,00	

- Penambahan merupakan DE 2017 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya Rp
- Pengurangan Saldo DE 2016 yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan Rp
- Pengurangan Saldo DE 2016 yang dihapuskan karena batal digunakan Rp .30.960.000,00

c. Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp .664.456.871,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Hibah Keluar belum Dihapuskan

URAIAN	JML BRG	NOMINAL (Rp)
TANAH		
Jumlah		
PERALATAN DAN MESIN		
a. Alat Besar		
b. Alat Angkutan		

c. Alat Bengkel		
d. Alat Pertanian & Peternakan		
e. Alat Kantor & Rumah Tangga		
f. Alat Studio & Komunikasi		
g. Alat Ukur		
h. Alat Kedokteran	122	.664.456.871,00
i. Alat Laboratorium		
j. Alat Keamanan		
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN	122	664.456.871,00
GEDUNG & BANGUNAN		
a. Bangunan Gedung		
b. Bangunan Monumen		
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN		
JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
a. Jalan & jembatan		
b. Bangunan Air (Irigasi)		
c. Instalasi		
d. Jaringan		
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN		
ASET TETAP LAINNYA		
a. Buku & Perpustakaan		
b. Barang Bercorak		

Kesenian/Kebudayaan		
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan		
ASET TETAP LAINNYA		
KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Jumlah	122	664.456.871

d. Barang berlebih yang belum dinilai sebesar Rp. *(kalau ada)*

e. dst

4. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Rusak Berat (RB), Tidak Ditemukan (TD) dan Hibah Keluar belum dihapuskan sebagai berikut :

Tabel Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD/Hibah Keluar

URAIAN	SALDO TH 2016	MUTASI AK. PENYUSUTAN BARANG (RB)	MUTASI AK. PENYUSUTAN BARANG (TD)	MUTASI AK. PENYUSUTAN HIBAH KELUAR	SALDO TH 2017
TANAH					
Jumlah					
PERALATAN DAN MESIN					
a. Alat Besar					
b. Alat Angkutan					
c. Alat Bengkel					
d. Alat Pertanian & Peternakan					
e. Alat Kantor &		68.016.760			

Rumah Tangga					
f. Alat Studio & Komunikasi					
g. Alat Ukur					
h. Alat Kedokteran		38.306.750			
i. Alat Laboratorium					
j. Alat Keamanan					
JUMLAH PERALATAN DAN MESIN		106,323,510			
GEDUNG & BANGUNAN					
a. Bangunan Gedung			6.163.305		
b. Bangunan Monumen					
JUMLAH GEDUNG & BANGUNAN			6.163.305		
JALAN, IRIGASI & JARINGAN					
a. Jalan & jembatan					
b. Bangunan Air (Irigasi)					
c. Instalasi		820.000			
d. Jaringan					
JUMLAH JALAN, IRIGASI & JARINGAN		820.000			
ASET TETAP LAINNYA					
a. Buku & Perpustakaan					
b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan					
c. Hewan/Ternak & Tumbuhan					
ASET TETAP					

LAINNYA					
KONSTRUKSI DALAM PENGGERJAAN					
Konstruksi Dalam Pengerjaan					
Jumlah		107,143,510.00	6.163.305		113,306,815



2.

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dengan saldo masing-masing sebesar dan Rp..... dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Th. 2017	Th. 2016
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Uang Muka dari Kas Daerah		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja		
Utang Jangka Pendek Lainnya		
RK-PPKD		
Jumlah		

1)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2017 Rp..... Saldo Utang PFK per 31 Desember 2017 merupakan :

1. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara) Rp
2. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 Rp.....
3. Dst (d disesuaikan dengan kondisi SKPD)

Atas kas tersebut masih berada di rekening Kas di Bendahara Pengeluaran

2) Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 nihil.

3) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2017 Rp

Pendapatan Diterima Dimuka :	2017	2016
	Rp	Rp
a.		
b.		
Jumlah		

4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 nihil.

5) Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2017 sebesar Rp . 7,846,631.00, dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	SALDO 2016	TAMBAH	KURANG	SALDO 2017
Belanja Pegawai	1,404,844	1,522,808	1,404,844	1,522,808
Belanja Barang/Persediaan				
Belanja Pemeliharaan				
Belanja Jasa	6,175,530.00	6,323,823.00	6,175,530.00	6,323,823.00
Belanja Perjalanan Dinas				
Jumlah	7,580,374.00	7,846,631.00	7,580,374.00	7,846,631.00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- i. Utang Belanja Pegawai merupakan Utang upah tenaga kebersihan sebesar Rp 1.522.808,00
- j. Utang Belanja Barang merupakan Utang atas pembelian sebesar Rp
- k. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan Utang atas Pemeliharaan sebesar Rp
- l. Utang Belanja Jasa merupakan Utang atas belanja listrik, telepon, internet, PDAM dan koran sebesar Rp 6,323,823.00
- m. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran utang pegawai tahun 2016 sebesar Rp. 1.404.844
- b. Utang Belanja Barang merupakan
- c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan
- d. Utang Belanja Jasa merupakan Utang atas belanja listrik, telepon, internet, PDAM dan koran tahun 2016 sebesar Rp 6,175,530.00
- Utang Belanja Perjalanan Dinas merupakan

6) Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah

Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal TA 2017 yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp dan Rp..... dengan rician sebagai berikut :

Utang Jangka Pendek Lainnya :	2017	2016
	Rp	Rp
a.		
b.		
Jumlah		

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Hutang sebesar Rp merupakan*
2. *Hutang sebesar Rp merupakan*
3. *Hutang Putus Kontrak atas pekerjaan tahun sebagai berikut :*

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1		
2		
3		
4		
	TOTAL	

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp. 12,396,138,087.00

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan

kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca SKPD DP3KB per 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebesar Rp. (6,193,054,748.51)Perubahan atas ekuitas tahun 2017 adalah sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2016 :	NILAI (Rp)
Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 (restatement)	5,861,464,752.35
Surplus/(Defisit)-LO	(11,452,346,322.83)
Koreksi Ekuitas	(602,173,178,00)
Jumlah	(6,193,054,748.51)

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan aset.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 sebesar Rp (12.396.138.087,00) Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp (11.452,346,323,00) sehingga memiliki perbedaan sebesar ((943,791,764.17),

Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

Hubungan LRA-LO Tahun 2017

No	Uraian	Rp

A	Surplus/(Defisit) LRA	(12.396.138.087,00)
	Penambahan	
1	Realisasi Belanja Modal	1,120,179,850.00
2	Mutasi Persediaan Tahun 2017	392.662.630,00
B	Jumlah Penambahan	1,512,842,480
	Pengurangan	
1	Mutasi Utang Beban Jasa 2017	148,293,00
2	Mutasi Utang Beban Pegawai 2017	117,964,00
3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	568,784,459
C	Jumlah Pengurangan	569,050,716,00
D	Surplus/(Defisit) LO (A+B-C)	(11,452,346,323.00)

Adapun penjelasan dari masing-masing item perbedaan antara LRA dan LO sebagaimana tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

1. Realisasi Belanja Modal

Nilai realisasi belanja modal Tahun 2017 sebesar 1,120,179,850.00 mengurangi surplus/(defisit) LRA, namun tidak mengurangi nilai surplus/(defisit) LO dikarenakan pada saat pengadaan aset dari belanja modal langsung menambah nilai aset tetap di neraca tanpa menambah beban di LO.

2. Mutasi Nilai Persediaan Tahun 2017

Mutasi Persediaan tahun 2017 adalah Saldo Persediaan tahun 2017 - Saldo Persediaan tahun 2016 sebesar 392,662,630

(uraian no 2 dst adalah CONTOH....sebaiknya dikembangkan sesuai uraian pada KK HUB LRA-LO)

2. Kapitalisasi Aset Tetap/Tak berwujud dari Belanja Non Modal

Total nilai kapitalisasi yang menambah nilai aset tetap tahun 2017 adalah sebesar Rp Ketika nilai aset tetap bertambah akibat dari pengadaan yang menggunakan pos belanja non modal, maka pada Laporan Operasional tetap tidak akan diakui sebagai penambah beban, namun tetap akan menambah nilai Aset Tetap di Neraca. Adapun rinciannya :

No	Jenis Belanja	Nilai
1	Belanja Pemeliharaan	
2	Belanja Jasa	
3	Belanja Barang/Persediaan	
	Jumlah	

3. Penerimaan Hibah Berupa Aset Tetap

Penerimaan hibah berupa barang sebesar dicatat sebagai penambah nilai aset tetap dan pendapatan pada Laporan Operasional. Karena penerimaan hibah tersebut tidak terdapat pada APBD, maka pendapatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan pada LRA.

4. Penerimaan Hibah Berupa Persediaan

Penerimaan hibah berupa barang persediaan sebesardicatat sebagai penambah nilai aset lancer dan pendapatan pada Laporan Operasional. Karena penerimaan hibah tersebut tidak terdapat pada APBD, maka pendapatan tersebut tidak tercatat sebagai pendapatan pada LRA.

5. Mutasi Piutang Tahun 2017

Mutasi piutang tahun berkenaan sebesar Rp merupakan nilai kenaikan piutang tahun 2017 dibandingkan dengan nilai piutang tahun sebelumnya. Nilai ini akan menambah pendapatan LO namun tidak akan mempengaruhi nilai pendapatan di LRA karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara kedua Laporan tersebut. Adapun mutasi dari piutang tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Penambahan Piutang

Pendapatan Asli Daerah	Rp
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp
Pendapatan Transfer	Rp

Pengurangan Piutang

Pendapatan Asli Daerah	(Rp)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	(Rp)
Pendapatan Transfer	(Rp)
Jumlah	Rp

6. Pendapatan Diterima Di Muka

Mutasi pendapatan diterima di muka sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

7. Surplus atas Penjualan Aset Tetap

Surplus atas Penjualan Aset Tetap sebagai berikut :

- a. Penjualan Peralatan Mesin = Rp.....
- b. Penjualan Gedung dan Bangunan = Rp.....
- c. Penjualan Jalan, Irigasi, Jaringan = Rp.....
- d. Penjualan Aset Lainnya = Rp.....

8. Transfer Pemerintah Pusat Kurang Bayar

Merupakan Kewajiban Pemerintah kepada Pemkab Brebes yang masih belum dibayar, rincian sebagai berikut :

- a.

b.

c.

9. Koreksi Harga, merupakan koreksi harga atas transaksi tahun 2017 sebagai berikut :

a.

b.

c.

(disesuaikan dengan kondisi SKPD)

(uraian no 1 dst adalah CONTOH....sebaiknya dikembangkan sesuai uraian pada KK HUB LRA-LO)

Pengurangan :

1. Penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan tahun sebelumnya

Pada akhir tahun 2016 terdapat nilai kas dibendahara penerimaan senilai dan disetorkan kepada Kas Daerah pada tahun 2017.

3. Belanja Modal Tidak Dikapitalisasi

Pada tahun 2017 terdapat ketidaksesuaian antara rekening belanja modal dengan pelaksanaan kegiatannya. Hal tersebut terjadi pada beberapa SKPD dikarenakan pelaksanaan anggaran belanja modal tidak memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap, sehingga akan menambah beban operasional tanpa menambah nilai aset tetap.

Adapun nilai non kapitalisasi atas belanja modal adalah sebesar Rp yang dapat dirinci sebagai berikut:

- Menambah Beban Persediaan sebesar Rp.....
- Menambah Beban Pemeliharaan sebesar Rp.....
- Menambah saldo persediaan sebesar Rp.....
- dst

4. Beban Penyusutan Aset Tetap, Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud dan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2017.

Pos beban penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud dan penyisihan piutang menjadi salah satu pembeda antara belanja LRA dan beban LO.

Beban penyusutan/amortisasi dan penyisihan piutang merupakan bentuk implementasi basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana nilai beban tersebut menunjukkan tingkat penurunan potensi yang dimiliki oleh aset suatu entitas. Sedangkan pada LRA yang berbasis kas nilai beban dimaksud tidak menjadi pengurang surplus/(defisit) LRA. Beban Penyusutan Tahun 2017 adalah Rp.568,784,459

5. Perbedaan pembebanan belanja dan beban dibayar dimuka

Pada LO tahun 2017 disajikan pos beban dibayar di muka yang merupakan bagian beban tahun 2017.

Sedangkan di LRA dicatat sebesar nilai kas yang dibayarkan, sehingga terjadi selisih nilai antara keduanya sebesar Rp..... Adapun Belanja tahun 2017 yang diakui sebagai Beban dan Beban Dibayar Di Muka tahun 2017 adalah :

No	Jenis Belanja	Belanja (LRA) th 2017	Beban th 2017	Beban Dibayar Di Muka
1	Belanja			
2	Belanja			
3	Belanja			
	Jumlah			

6. Defisit Penghapusan Aset Tetap

Defisit penghapusan aset tetap diukur berdasarkan kerugian akibat dilaksanakannya penghapusan aset tetap. Apabila penghapusan suatu aset tetap yang masih memiliki nilai ekonomis, maka surplus/defisit penghapusan aset tetap disajikan sebesar selisih antara nilai jual dengan nilai buku aset tersebut. Pos ini hanya disajikan dalam Laporan Operasional dan tidak disajikan dalam LRA.

7. Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2017 sebesar Rp.....

Pada Tahun 2017, nilai pendapatan diterima dimuka merupakan salah satu penyebab selisih antara surplus/(defisit) LRA dengan surplus/(defisit) LO. Nilai di LRA diakui berdasarkan kas yang diterima pada satu periode pelaporan, sedangkan di LO diakui ketika munculnya hak atas pendapatan pada tahun pelaporan.

8. Mutasi Utang Tahun 2017 sebesar Rp. 266.257,00

Kenaikan/penurunan utang belanja/utang jangka pendek juga menjadi pembeda antara LRA dan LO. di tahun 2017 terjadi kenaikan nilai utang sebesar Rp. 266.257,00 sehingga nilai beban yang disajikan dalam LO menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan nilai belanja di LRA. Sedangkan nilai penurunan atas utang adalah sebesar Rp

9. Koreksi Harga merupakan

(.....dst..... dikembangkan sendiri.....)

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan pendapatan Asli Daerah-LRA tahun 2017 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

1. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA tahun 2016 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan piutang tahun 2017 Rp

 Dst ...

Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya
 (Rp)
 Dst ...
 Jumlah Rp

Penambahan dan pengurangan piutang pajak tahun 2017 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Jenis Pajak	Penambahan (Rp)	Penguranga (Rp)
1	Pajak Hotel		
2	Pajak Restoran		
3	Pajak Hiburan		
4	Pajak Reklame		
5	PPJ PLN		
6	Pajak Parkir		
7	Pajak Air Tanah		
8	Pajak Mineral bukan Logam dan		
9	Pajak Bumi dan Bangunan		
JUMLAH			

2. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA tahun 2017 adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

--	--	--

yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan piutang tahun 2017 :

- Piutang	Rp
- Piutang	Rp
Jumlah Penambahan	Rp
- Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sblmnya	Rp
- Pengurangan atas pendapatan diterima dimuka	Rp
Dst	
Jumlah Pengurangan	Rp
Jumlah	Rp

Pengurangan atas pendapatan diterima di muka adalah pengurangan atas pendapatan yang telah disetorkan atasuntuk jangka waktu tahun terhitung mulai sampai dengan

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih sebesar antara pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada LO dengan LRA merupakan pembayaran atasdan telah diakui sebagai pendapatan LO pada tahun

4. Lain-lain PAD yang Sah

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

--	--	--

Selisih sebesar Rp antara Lain-lain PAD yang Sah-LRA dengan Lain-lain PAD yang Sah-LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan :

Penambahan atas piutang..... tahun 2017 Rp
dst

Pengurangan :

Pengurangan atas pembayaran piutang (Rp)
Pengurangan atas piutang TGR (Rp)
Pengurangan atas denda kegiatan tahun (Rp)
dst

B. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA adalah sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Selisih antara Dana Bagi Hasil Pajak-LO dengan Dana Bagi Hasil Pajak-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LO dengan pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

3. Dana Alokasi Umum

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Umum-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

4. Dana Alokasi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

5. Dana Otonomi Khusus

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Alokasi Khusus-LO dengan pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

6. Dana Penyesuaian

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

7. Pendapatan Bagi Hasil Pajak

Terdapat selisih antara pendapatan Dana Penyesuaian-LO dengan pendapatan Dana Penyesuaian-LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

8. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

9. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya-LO dengan pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya -LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

C. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Pendapatan Hibah

Terdapat selisih antara pendapatan hibah-LO dengan pendapatan hibah-LRA Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan :

Dropping persediaan dari BKKBN Provinsi	Rp
Hibah aset tetap dari	Rp
Penambahan dari pihak ketiga	Rp
Pengurangan	
(Rp.....)	
Jumlah	Rp

2. Pendapatan Lainnya

Terdapat selisih antara pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Penambahan	Rp
Pengurangan	(Rp)
Jumlah	Rp

D. SURPLUS NON OPERASIONAL

1. Surplus Penjualan Aset

Surplus penjualan aset non lancar sebesar Rp..... merupakan penjualan atas aset yang dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)
Jumlah		

2. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Nilai Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp..... dapat dirinci sebagai berikut :

No	Keterangan	Nilai
		(Rp)

	Jumlah	

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BELANJA OPERASI

1. Belanja Pegawai

Terdapat selisih antara Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
7.849.678.011,00	7.849.560.047,00	117,964.00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai (Rp)
	Belanja Pegawai LRA	7.849.560.047,00
	Penambahan :	
	- Utang Beban Pegawai honorer desember 2017 yang dibayar kan di tahun 2018	1,522,808.00
	- Utang	
	- Utang	
	Pengurangan :	
	- Utang Beban Pegawai honorer desember 2016 yang dibayar kan di tahun 2017	1,404,844.00
	- Utang yang dibayar pada th 2017	
	Beban Pegawai LO	7.849.678.011,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp .148,293.00,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama	LO	LRA	Selisih
1	Utang Beban Jasa	1.219.380.220,00	1,219,231,927	148,293.00
2	Beban Persediaan	896,758,083.00	1,289,420,713	392,662,630.00
3				
4				
5				
	Jumlah			

1) Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp 392,662,630.00 terdiri atas :

Penambahan :

Pengadaan barang Persediaan yang belum terbayar Rp
 Belanja Modal yang menambah nilai persediaan Rp
 Saldo Akhir Persediaan 2017 Rp
 Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp

Pengurangan :

Pembayaran utang persediaan tahun sebelumnya Rp
 Belanja persediaan yang di kapitalisasi ke Aset tetap Rp
 Mutasi Tambah Nilai Persediaan tahun sebelumnya Rp 392,662,630.00
 Dst ...

Jumlah Rp

2) Selisih antara beban jasa di LO dengan Belanja Jasa di LRA senilai Rp148,293.00 terdiri atas :

Penambahan :

- B. Modal yang tidak dikapitalisasi direklasifikasi ke B. Jasa Rp
 - Beban Barang BOS Rp
 - Beban yang masih belum terbayar sampai dengan akhir tahun 2017 Rp 6,323,823.00
 - Perbedaan Pengakuan antara LO dan LRA Rp

- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Rp
- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp

Pengurangan

- Belanja Jasa yang di Kapitalisasi ke Aset Tetap (Rp)
- Pembayaran utang jasa tahun sebelumnya (Rp 6,175,530.00)
- Jumlah Rp

3) Selisih antara beban sewa-LO dengan belanja Sewa-LRA senilai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

merupakan tambahan belanja Non APBD yaitu

4) Selisih antara beban perjalanan dinas di LO dengan belanja perjalanan dinas di LRA sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

merupakan

5) Selisih antara beban pemeliharaan di LO dengan belanja pemeliharaan di LRA senilai Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

terdiri atas :

Penambahan :

- Reklasifikasi dari Beban Barang dan Jasa Lainnya Rp

Pengurangan :

- Belanja Pemeliharaan yang di Kapitalisasi ke aset Tetap (Rp)
- Belanja pemeliharaan yang menambah saldo persediaan (Rp)
- Reklasifikasi ke Beban Jasa (Rp)
- Jumlah Rp

6) Selisih antara beban makanan dan minuman di LO dengan belanja makanan dan minuman di LRA senilai Rp terdiri dari :

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Penambahan :

- Beban yang belum terbayar sampai akhir tahun Rp
- Belanja Non APBD dari Rp
- Reklasifikasi dari beban barang dan jasa lainnya Rp

Pengurangan :

- Pembayaran utang tahun sebelumnya Rp
- Jumlah Rp

7) Selisih antara beban barang dan jasa lainnya di LO dengan belanja barang dan jasa lainnya di LRA senilai Rp..... terdiri dari :

- Reklasifikasi dari ke Beban Rp
- Reklasifikasi dari ke Beban Rp
- Jumlah Rp

3. Belanja Hibah

Belanja hibah pada Laporan Realisasi Anggaran memiliki perbedaan nilai dengan beban hibah pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp..... memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

5. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp..... memiliki perbedaan nilai dengan Beban Bantuan Keuangan pada Laporan Operasional yakni sebesar Rp

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

Selisih tersebut merupakan

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp 568,784,459

7. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan realisasi Anggaran yakni sebesar Rp.....

8. Belanja modal pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp. 1.120.179.850 namun tidak dicatat pada Laporan Operasional.

9. Belanja Tak Terduga

3.2.2.2 TRANSFER

Belanja Transfer pada Laporan Realisasi Anggaran terealisasi sebesar Rp.....

Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih

3.2.2.3 KEGIATAN NON OPERASIONAL

A. DEFISIT PENJUALAN ASET NON LANCAR

Defisit ini merupakan defisit atas Penghapusan Aset Tetap yang hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp

B. DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya hanya dicatat pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada LRA yakni sebesar Rp..... yang merupakan defisit karena

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1.1 UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Brebes, Keududukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes adalah merupakan Lembaga Tekhnis Daerah yang dipimpin oleh seseorang kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Brebes melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes adalah membantu Bupati Brebes dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang promosi keluarga berencana, kesehatan reproduksi, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan dan anak.

4.1.2 VISI DAN MISI SKPD

Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kab. Brebes tertuang dalam Renstra Tahun 2012-2017, sebagai berikut :

Visi :

“Seluruh Keluarga ikut KB serta terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender yang dapat melindungi perempuan dan anak menuju masyarakat sejahtera”.

Misi :

- a. Menggerakan dan memberdayakan masyarakat dalam program KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- b. Menata kembali pengelolaan program KB untuk menurunkan total fertility rate
- c. Memperkuat sumber daya manusia (SDM) operasional program KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- d. Meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan KB & KR
- f. Melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang program KB, PP dan PA serta PKBR
- g. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di semua bidang kehidupan
- h. Mengembangkan system informasi dan manajemen program KB, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dengan menyediakan informasi data mikro untuk kepentingan pembangunan
- i. Mewujudkan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga berencana sehingga terbentuk keluarga kecil bahagia sejahtera
- j. Meningkatkan partisipasi lembaga masyarakat dalam program keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

4.1.3 ORGANISASI

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) membawahi :

1. Sekretaris

- a. Kasubag Umum dan Kepegawaian
- b. Kasubag Program dan Keuangan
- 2. Kabid Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kasi Pembinaan Kesertaan Berkeluarga Berencana
 - b. Kasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- 3. Kabid Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - a. Kasi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
 - b. Kasi Advokasi, Penyuluhan dan Penggerakan
- 4. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Kasi Pemberdayaan Perempuan
 - b. Kasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- 5. Ka. UPT DP3KB Kecamatan (Eselon IV.a)

4.1.4 PERSONALIA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Brebes memiliki 108 personil, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Badan/Dinas/Kantor, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 7 (tujuh) orang Kasubag/Kasubid, 14 (empat belas) orang Kepala UPT DP3KB Kecamatan 54 (Lima Puluh empat). orang Penyuluh KB, 16 (Enam Belas) orang staf di PNS, 1 (satu) orang tenaga honorer, dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak.

BAB V

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2017. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BREBES**

Drs. KHAMBALI, M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601114 198512 1 001